

Judul : Memimpin Ditengah Kinerja Buruk
Tanggal : Senin, 15 Januari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 4

Memimpin di Tengah Kinerja Buruk

Sejumlah pemimpin fraksi meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat meningkatkan kinerja lembaga itu. Selama ini kinerja Dewan kerap menjadi sorotan karena tidak produktif. "Setelah reformasi, periode sekarang tidak berprestasi," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Mufachri Harahap, kemarin.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Kemarin malam, Golkar menggelar rapat harian terbatas untuk penunjukan Bambang. Rencananya, hari ini bakal diumumkan.

Kursi Ketua DPR memang jatah Partai Golkar sesuai dengan hasil proses politik di Dewan pada 2014 lalu. Kala itu diputuskan bahwa pemimpin Dewan menjadi milik Paket Koalisi Merah Putih, pendukung pasangan calon presiden wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sebagai partai dengan suara terbesar dalam koalisi itu, Golkar mendapatkan jatah posisi ketua DPR.

Kini, keputusan mengenai pengganti Setya sepenuhnya ada di tangan Golkar. Menurut Mufachri, tantangan berat Ketua DPR saat ini adalah memimpin Dewan untuk memenuhi target legislasi. Tahun lalu, dari 50 undang-undang prioritas, hanya enam yang berhasil disahkan. Tahun ini diprediksi bakal lebih berat lagi karena para anggota Dewan bakal sibuk dengan pemilihan kepala daerah serentak. Mufachri meminta Bambang segera berkoordinasi dengan para pemimpin fraksi dan komisi begitu dilantik.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Junimart Girsang, meminta Ketua DPR baru membangun komunikasi, baik di lingkup internal lembaga legislatif maupun dengan pemerintah. Ia juga berharap kinerja DPR bisa meningkat. "DPR harus dibangun kembali dalam etika, marwah, dan kinerjanya," kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan untuk mendongkrak kinerja Dewan, Ketua DPR mesti menedepankan musyawarah dengan semua anggotanya. "Selingga potensi menjerembatani perbedaan pendapat lebih terbuka lebar," ujar dia.

● DEWI NURITA | DANANG FIRMAN TO